

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TERHADAP OBJEK JAMINAN  
FIDUSIA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 42 TAHUN 1999**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ANDY**

**NIM 20.10.0001**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

**2024**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

**TANDA PERSETUJUAN S KRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD ANDY  
NPM : 20.10.0001  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA  
JUDUL : **“TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TERHADAP  
OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN  
KETENTUAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 42 TAHUN 1999”**

PALEMBANG, 17 Mei 2024

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I



Hj. SURYANI YUSI S.H., M.Hum.

PEMBIMBING II



ERNIWATI S.H., M.Hum.

MENGETAHUI,

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG



ERNIWATI S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Andy

Tempat, tanggal Lahir : Palembang, 09 April 2002

NPM : 20.10.0001

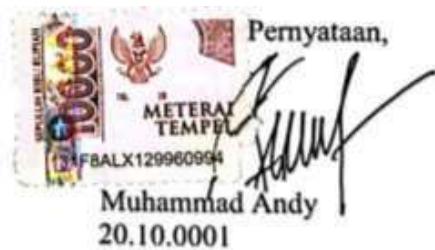
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian Karya Ilmiah ini.

Palembang, 02 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,



***Motto:***

***“Dan Bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah  
adalah Benar”***  
***(Qs Ar-Ruum 60)***

***“Saya Pasti Bisa , Saya Pasti Bermanfaat  
,Dan Allah Pasti Bantu Saya”***  
***( Alm. Latief Hasjim)***

**Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk :**

- ❖ Mama yang telah melahirkanku
- ❖ Ayah yang Membesarkanku
- ❖ Kedua Adikku Khoiruallah Mufri dan Alfian Risqie
- ❖ Dekan Fakultas Hukum
- ❖ Dosen Fakultas Hukum
- ❖ Teman-Teman seperjuangan
- ❖ BEM Fakultas Hukum UIBA
- ❖ Kantor Hukum Abadi & Rekan
- ❖ Almamaterku

## ABSTRAK

**“Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999”** merupakan judul skripsi ini sebagai berikut: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban dalam Kasus Penggelapan Objek Jaminan Fidusia yang Mengalihkan,Mengadaikan dan Menyewakan benda menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dan: Bagaimanakah Analisis yuridis kasus penggelapan objek jaminan fidusia berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dalam Penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis normative dan Yuridis empiris.

Bentuk upaya perlindungan hukum terhadap pemberi fidusia dalam kasus penggelapan objek jaminan fidusia telah diatur pasal 23 ayat (2) dan dapat terancam sanksi pidana sesuai dengan pasal 36 Undang-undang jaminan fidusia, berupa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan demikian penyelesaian hukum yang terbaik ialah dengan menekankan upaya perlindungan hukum yang bersifat refresif

Sedangkan analisis bahwa, majelis hakim pengadilan negri Palembang mengatakan bahwa terkait kasus penggelapan objek jaminan fidusia sudah tepat apabila dikategorikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan karena telah memenuhi beberapa unsur-unsur penggelapan yang diantaranya mengakui barang milik sendiri dan melawan hukum dan ketentuan pasal 36 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 sudah tepat dalam pemberian sanksi tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia karena objek tersebut telah dialihkan kepada orang lain kemudian dijualnya dengan status mengakui sebagai barang milik sendiri. Sehingga perbuatan tersebut tidak diperbolehkan karena masih berstatus sebagai jaminan

**Kata Kunci:** Jaminan Fidusia, Penggelapan, Perlindungan Hukum

## ABSTRACT

**"Criminal Act of Embezzlement of Fiduciary Guarantee Objects Based on the Provisions of Article 36 of Law Number 42 of 1999"** is the title of this thesis as follows: What is the legal protection for victims in Cases of Embezzlement of Fiduciary Objects Who Transfer, Acquire and Rent objects according to Law Number 42 1999 and: What is the juridical analysis of cases of embezzlement of fiduciary guarantee objects based on the provisions of article 36 of Law Number 42 of 1999. In this thesis research, the author uses legal research methods with normative juridical and empirical juridical approaches.

Forms of legal protection efforts for fiduciary givers in cases of embezzlement of fiduciary guarantee objects are regulated by article 23 paragraph (2) and can be threatened with criminal sanctions in accordance with article 36 of the fiduciary guarantee law, in the form of being punished with imprisonment for a maximum of 2 (two) years and a fine. a maximum of IDR 50,000,000 (fifty million rupiah), thus the best legal solution is to emphasize repressive legal protection efforts

Meanwhile, in their analysis, the panel of judges at the Palembang District Court said that in relation to the case of embezzlement of fiduciary collateral objects, it is appropriate to categorize it as a criminal act of embezzlement because it fulfills several elements of embezzlement, including admitting that one's own property is against the law and the provisions of article 36 of the law. Number 42 of 1999 is appropriate in providing sanctions for criminal acts of embezzlement of fiduciary collateral objects because the object has been transferred to another person and then sold with the status of recognizing it as one's own property. So this action is not permitted because it still has the status of collateral

**Keywords:** Fiduciary Guarantee, Embezzlement, Legal Protection

